

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
AGLOMERASI, TINGKAT PENGANGGURAN, DAN  
PANJANG JALAN TERHADAP KETIMPANGAN  
ANTAR WILAYAH MENURUT TIPOLOGI KLASSEN  
PADA 25 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
BARAT TAHUN 2004-2008**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ASMAN AL FAIZ**

**NIM. C2B607011**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Asman Al faiz  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B 607 011  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP  
Judul Skripsi : **(ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN  
EKONOMI, AGLOMERASI, TINGKAT  
PENGANGGURAN, DAN PANJANG  
JALAN TERHADAP KETIMPANGAN  
ANTAR WILAYAH MENURUT  
TIPOLOGI KLASSEN PADA 25  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
JAWA BARAT 2004-2008)**

Dosen Pembimbing : Drs. Nugroho SBM, MSP.

Semarang, 14 Agustus 2011

Dosen Pembimbing,

(Drs. Nugroho SBM, MSP.)

---

NIP. 196105061987031002

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Asman Al Faiz bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran, Dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen Pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan,

(Asman Al Faiz)

---

NIM. C2B607011

## ABSTRACT

*Economic Growth in West Java province year by year continually is increased even though it had dropped in 2008. Within four years, the economic growth increased from 4.77 per cent (in 2004) up to 6.04 per cent (in 2007). Increasing of economic growth is followed by the uneven across regions as seen from the Regional Typology criteria. Based on the typology criteria, a total of 14 districts / cities in West Java province entered into left-behind-area criteria.*

*This study aims to analyze the effect on the economic growth, Agglomeration, unemployment rate, and the long road toward imbalance in the region of West Java province in the period 2004 to 2008. This study uses secondary data by using panel data model, analysis fixed effect model.*

*From the results obtained that in the period 2004 to 2008, economic growth, agglomeration, unemployment rates significantly and positively affect against inequality territory, but the length of the road did not significantly influence the region inequality.*

*Keyword: Regional inequality, Economic Growth, Agglomeration, Unemployment Rate, Long Road.*

## ABSTRAK

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dari Tahun-ketahun terus mengalami peningkatan walupun sempat turun ditahun 2008. Dalam kurun waktu empat tahun pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,77 persen ( tahun 2004), hingga 6,04 persen ( tahun 2007). Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan ini diikuti dengan adanya ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari kriteria Tipologi Daerah. Berdasar kriteria tipologi daerah, sebanyak 14 kabupaten/kota di provinsi Jawa barat masuk ke dalam kriteria daerah relatif tertinggal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat pengangguran, dan panjang jalan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat pada priode tahun 2004 hingga tahun 2008. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan model panel data analisis *fixed effect* model.

Dari hasil penelitian didapat bahwa pada priode tahun 2004 hingga tahun 2008, pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan wilayah, akan tetapi panjang jalan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Keyword : ketimpangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran, Panjang Jalan.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap”*

*(Qs. Alam Nasyrah : 6-8)*

*“Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan sabar maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakannya orang-orang berbuat baik”*

*(Q.S Yusuf : 90)*

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

*(Ar Ra'du: 11)*

*Kegagalan bukan berarti kehancuran, tetapi sebagai batu loncatan menuju sukses*

*(Phytagoras)*

***Skripsi ini aku persembahkan kepada :***

- ❖ *Ayah dan Bunda atas semua untaian doa dan dorongannya*
- ❖ *Adikku yang selalu menjadi semangat hidupku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang telah mengajariku makna cinta dan persahabatan dalam hidup*
- ❖ *Orang-orang yang berarti dalam hidupku dan membuatku mengerti tentang makna kehidupan*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dan terima kasih selalu dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dan suri tauladan kami, sehingga atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, AGLOMERASI, TINGKAT PENGANGGURAN, DAN PANJANG JALAN TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH MENURUT TIPOLOGI KLASSEN PADA 25 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2004-2008”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Terima kasih atas segala bimbingan, saran dan kerja sama dari banyak pihak selama pengerjaan skripsi ini. Sebelumnya, tidak lupa ucapan maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kesalahan selama proses penelitian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Melalui tulisan yang sederhana jni, ucapan terima kasih ditujukan kepada :

1. Bapak Prof.. Drs. Mohamad Nasir, M. Si, Akt., Ph.D selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof.Drs. H. Waridin Ms., Ph.D selaku Dosen Wali yang telah sabar mendampingi dan membimbing penulis dan teman-teman IESP angkatan 2007
3. Bapak Drs. Nugroho SBM, MSP. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapakku terhormat Rohani Al Roni yang selama ini telah mencukupi segala kebutuhan pendidikan. Buat ibuku tercinta Elly Dahlia yang selalu mendoakan dan membimbing saya agar tetap di jalan yang benar. Doa dan

dukunganmu adalah anugerah yang terindah yang saya miliki untuk menghadapi kehidupan ini

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, khususnya Jurusan IESP atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan dalam masa studi penulis. Seluruh staf, karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pelayanan yang baik.
6. BPS Jawa Barat yang telah membantu dalam memperoleh data.
7. Adikku tersayang Melisa Agustin dan Fitria Ramadhani yang telah menjadi motivator agar saya bisa lebih baik lagi. Semangat dan dukunganmu sangat berharga bagi penulis, maka jangan pernah putus asa untuk terus berusaha membahagiakan orang tua kita tercinta
8. Teman-teman: suhael, mas mugi, mas fa'i, darmo, Teguh Heri, Wulan, Indah Kustia dan haris yang telah menemani penulis disaat susah dan senang selama ini. Azumar, lutfi, yang kamarnya menjadi tempat pelarian kalo kost sepi.
9. Kunwafiyah Nurcahyani terima kasih atas persahabatannya selama ini. Terima kasih atas semua dukungannya, bantuan, masukan, ide, dan doanya selama ini.
10. Teman-teman kertanegara kost : panji, aji, yoksun, ridwan, rifki mas fais dan penghuni gelap didik terus jaga maen-maen dan kekompakannya.
11. Teman sekost tembalang : norma, sigit, teguh, terima kasih atas dukungannya
12. Teman-teman IESP : Yoga, Nugroho, Bagus Ardi, Merna, Putria, surya, Marsaulina, margin dan teman senasib dan seperjuangan IESP angkatan 2007 atas kebersamaan dan semangatnya selama ini.
13. Teman-Teman Peduli Dhuafa : Angling, Toki, Atina, Intan, Rizka, Norma, Diana, Raka, Dana, Rahmat, Agil.
14. Teman-teman KUNANG 07, Terimakasih Atas Bantuan dan dukungannya selama ini.

15. Teman-Teman Mizan dan ZIS center ekonomi : aris, ikbal, almarhummah santi, Rohman, Ias, Firda, Frida 07, Frida 08, Suna, Shinta, Pepy, Noni, Mauluvi, terimakasih atas semangat yang telah diberikan.
16. Teman Mizan FE&BSO, terimakasih atas semua dukungan dan ukhuwahnya selama ini.
17. Teman KKN Desa Kesongo terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Agustus 2011

Penulis

Asman Al Faiz

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii      |
| PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....   | iii     |
| ABSTRACT.....  | iv      |
| ABSTRAKSI .....  | v       |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN .....   | vi      |
| KATA PENGANTAR .....   | vii     |
| DAFTAR TABEL .....   | xii     |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xiii    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | xiv     |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1       |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....  | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 13      |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                       | 14      |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 15      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 17      |
| 2.1 Landasan Teori.....  | 17      |
| 2.1.1 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah.....                               | 17      |
| 2.1.2 Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah...                          | 18      |
| 2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah.                        | 22      |
| 2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....  | 26      |
| 2.1.5 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan<br>Ketimpangan Wilayah.....   | 27      |
| 2.1.6 Aglomerasi .....   | 30      |
| 2.1.7 Hubungan Antara Aglomerasi Dan Ketimpangan<br>Pembangunan Wilayah.....   | 31      |
| 2.1.8 Tipologi Daerah .....  | 32      |
| 2.1.9 Tingkat Pengangguran .....   | 34      |
| 2.1.10 Hubungan Antara Tingkat Pengangguran Dengan<br>Ketimpangan Wilayah..... | 35      |
| 2.1.11 Panjang Jalan.....  | 36      |
| 2.1.12 Hubungan Antara Panjang Jalan Dengan Ketimpangan<br>Wilayah .....       | 37      |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....   | 38      |
| 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....  | 41      |
| 2.4 Hipotesis .....  | 42      |
| BAB III METODE PENELITIAN.....   | 43      |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....                         | 43      |
| 3.1.1 Variabel Penelitian .....  | 43      |
| 3.1.2 Devinisi Operasional Variabel.....                                       | 43      |

|   |    |
|---|----|
| 3.2 Jenis Dan Sumber Data .....                                   | 46 |
| 3.3 Metode Analisis .....   | 47 |
| 3.4 Metode Penelitian .....                                       | 48 |
| 3.4.1 Regresi Model Data Panel Pendekatan <i>Fixed Effect</i> ... | 49 |
| 3.4.2 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik.....                   | 53 |
| 3.4.2.1 Uji Heteroskedastisitas .....                             | 53 |
| 3.4.2.2 Uji Autokorelasi .....                                    | 53 |
| 3.4.2.3 Uji Multikolinieritas .....                               | 54 |
| 3.4.2.4 Uji Normalitas .....                                      | 55 |
| 3.4.3 Pengujian Statistik .....                                   | 55 |
| 3.4.3.1 Pengujian $R^2$ .....                                     | 55 |
| 3.4.3.2 Uji Keseluruhan (F-stat) .....                            | 56 |
| 3.4.3.3 Uji Parsial (t-stat) .....                                | 57 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                 | 59 |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....                               | 59 |
| 4.1.1 Letak Geografis Dan Tata Guna Lahan .....                   | 59 |
| 4.1.2 Ketimpangan Wilayah.....                                    | 60 |
| 4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....                                    | 61 |
| 4.1.4 Aglomerasi .....  | 64 |
| 4.1.4 Tingkat Pengangguran .....                                  | 65 |
| 4.1.6 Panjang Jalan.....  | 66 |
| 4.2 Analisis Data .....   | 68 |
| 4.2.1 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik .....                  | 68 |
| 4.2.1.1 Uji Heteroskedastisitas .....                             | 68 |
| 4.2.1.2 Uji Autokorelasi.....                                     | 69 |
| 4.2.1.3 Uji Multikolinieritas .....                               | 70 |
| 4.2.1.4 Uji Normalitas .....                                      | 71 |
| 4.3.1 Hasil Uji Statistik .....                                   | 72 |
| 4.3.1.1 Uji $R^2$ .....   | 72 |
| 4.3.1.2 Uji Keseluruhan ( F-stat) .....                           | 72 |
| 4.3.1.3 Uji Parsial ( t-stat) .....                               | 73 |
| 4.3 Intepretasi Hasil Dan Pembahasan.....                         | 75 |
| BAB V PENUTUP.....  | 80 |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 80 |
| 5.2 Saran .....   | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN  |    |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Menurut Wilayah 2004-2008 .....  | 4       |
| Tabel 1.2 laju Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2004-2004..   | 5       |
| Tabel 1.3 Kondisi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Menurut Kriteria Tipologi Daerah .....  | 7       |
| Tabel 4.1 keadaan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2008 .....   | 60      |
| Tabel 4.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008.....   | 62      |
| Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008 .  | 63      |
| Tabel 4.4 Aglomerasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008 .....   | 64      |
| Tabel 4.5 Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2004-2008 .....  | 66      |
| Tabel 4.6 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2004-2008 .....   | 67      |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedstisitas .....   | 68      |
| Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Breusch-Godfrey</i> .....   | 69      |
| Tabel 4.9 Hasil Auxiliary Regresion Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran, Panjang Jalan, Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Jawa Barat Tahun 2004-2008 .....        | 70      |
| Tabel 4.11 Nilai Statistik dan Koefisien Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Jawa Barat Tahun 2004-2008 ..... | 74      |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Pengangguran Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008 (persen) ..... | 10      |
| Gambar 1.2 Perkembangan Panjang Jalan Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008 (km) .....           | 12      |
| Gambar 2.1 Kurva Lorenz .....  | 21      |
| Gambar 2.2 Kurva Kusnet .....  | 29      |
| Gambar 4.1 Hasil Uji <i>Jarque-Bera</i> .....  | 71      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran A Data.....   | 87  |
| Lampiran B Data Konveksi .....   | 98  |
| Lampiran C Hasil Regresi Utama.....  | 106 |
| Lampiran D Uji Asumsi Klasik : Multikolinieritas, Heteroskedastisitas,<br>Autokolerasi, Normalitas ..... | 108 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakangnya**

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu : meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Negara Dunia Ketiga atau yang lebih sering disebut dengan Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan negara-negara yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek pembangunan ekonomi. Penyebab semakin meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang ialah keinginan dari NSB untuk dapat mengejar ketinggalan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju

pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Masli, 2008). Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi, masalah yang sering terjadi adalah masalah pemerataan dan kemiskinan. Menurut Kuznets (dalam Todaro, 2004), pada awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi ini dikenal sebagai kurva Kuznets “ U-terbalik”, yang dengan kata lain bahwa ketimpangan pada awal pertumbuhan akan semakin memburuk, namun pada akhirnya, dengan semakin dewasanya perekonomian, pertumbuhan akan cenderung merata. Ketimpangan lebih banyak terjadi di Negara sedang berkembang. Menurut World Development report dalam Todaro (2004), karakteristik yang sering dijumpai di Negara berkembang pada umumnya antara lain (1) standar hidup yang relatif rendah, ditunjukkan dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan yang parah, kesehatan yang buruk, dan kurang memadainya pendidikan, (2) tingkat produktifitas yang rendah, (3) tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi, (4) ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer ( bahan-bahan mentah), (5) pasar yang tidak sempurna dan terbatasnya informasi yang tersedia, (6) dominasi ketergantungan, dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang melakukan pembangunan secara terarah dan intensif sejak Pelita I (jaman orde baru yang dimulai 1 april 1969). Secara geografis, indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil. Dalam perjalanannya melaksanakan pembangunan ekonomi baik dalam konteks negara maupun daerah kerapkali terjadi ketidakmerataan dan secara sparsial menimbulkan ketimpangan daerah, terutama jawa dengan luar pulau jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Kuncoro, 2002)

Negara Indonesia terdiri atas 33 Provinsi memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh Provinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Tingkat

pertumbuhan PDRB antar wilayah tahun 2004-2008 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatra sebesar 4,18%, wilayah Jawa dan Bali sebesar 5,77%, wilayah Kalimantan sebesar 3,57% dan wilayah Sulawesi sebesar 7,57% wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mengalami pertumbuhan sebesar 2,43%.

Tabel 1.1  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga konstan 2000 Menurut Wilayah 2004-2008

| Wilayah                       | 2004 | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | rata-rata |
|-------------------------------|------|-------|------|------|------|-----------|
| Sumatra                       | 2,93 | 3,57  | 5,26 | 4,95 | 4,92 | 4,18      |
| jawa & bali                   | 5,38 | 5,75  | 5,76 | 6,18 | 5,89 | 5,77      |
| Kalimantan                    | 3,01 | 3,92  | 3,8  | 3,53 | 5,26 | 3,57      |
| Sulawesi                      | 10,3 | 6,28  | 6,83 | 6,88 | 7,72 | 7,57      |
| Nusa tenggara, maluku & Papua | 5,26 | 13,97 | 4,03 | 5,06 | 2,4  | 2,43      |

Sumber : BPS, statistik Indonesia, berbagai tahun terbitan

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa terjadi ketidakmerataan pertumbuhan di wilayah Indonesia. wilayah yang mengalami pertumbuhan yang tinggi yakni wilayah Sulawesi serta Jawa dan Bali. Sedangkan wilayah yang pertumbuhan terendah adalah wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Perbedaan pertumbuhan ini menimbulkan ketimpangan antar daerah.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa dengan tingkat pertumbuhan yang positif, Provinsi Jawa Barat juga menduduki rata-rata tertinggi ke empat di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa di tempati oleh DKI Jakarta dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01 persen; peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89 persen; peringkat ketiga ditempati oleh

Provinsi Banten dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen; peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 5,72 persen; peringkat ke lima ditempati oleh provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53 persen dan yang terakhir ditempati oleh provinsi DIY dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,46 persen.

Tabel 1.2  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2004-2008

| Nama Provinsi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | rata-rata |
|---------------|------|------|------|------|------|-----------|
| DKI           | 5,65 | 6,01 | 5,95 | 6,44 | 6,22 | 6,01      |
| Banten        | 5,63 | 5,88 | 5,57 | 6,04 | 5,77 | 5,78      |
| Jawa barat    | 4,77 | 5,6  | 6,02 | 6,48 | 5,84 | 5,72      |
| Jawa Tengah   | 5,13 | 5,35 | 5,33 | 5,59 | 5,46 | 5,53      |
| DIY           | 5,12 | 4,73 | 3,7  | 4,31 | 5,02 | 4,46      |
| Jawa timur    | 5,83 | 5,48 | 5,8  | 6,11 | 5,94 | 5,89      |
| Indonesia     | 5,35 | 5,69 | 5,5  | 6,35 | 6,01 | 5,88      |

Sumber : BPS, statistik Indonesia, berbagai tahun terbitan.

Berdasarkan Tabel 1.2, Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, walau sempat menurun di tahun 2008. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2005-2008 sebesar 5,72%.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan tren positif, namun tidak diikuti dengan pemerataan di wilayah Kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Ketidakmerataan dapat dilihat dengan menggunakan kriteria tipologi daerah. Mudrajat Kuncoro (2004) menyatakan bahwa gambaran dan pola struktur pertumbuhan masing-masing daerah yang merepresentasikan kesejahteraan penduduknya dapat diketahui dengan menggunakan tipologi daerah yang berdasar 2 indikator utama yakni pertumbuhan daerah dan pendapatan per

kapita daerah. Caranya adalah dengan menentukan PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal dan laju pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal sehingga dapat dibedakan klasifikasi kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) yakni kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB perkapita di atas rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat (6.506.200.000 rupiah), dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (5,72%)
2. Daerah berkembang cepat (*high growth and high income*) yakni kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB perkapita dibawah rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat (6.506.200.000 rupiah), dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (5,72%)
3. Daerah maju tapi tertekan (*high growth and high income*) yakni kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB perkapita di atas rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat (6.506.200.000 rupiah), dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (5,72%)
4. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh ( *high growth and high income*) yakni kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB per kapita dibawah rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat (6.506.200.000 rupiah), dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (5,72%)

Tabel 1.3  
Kondisi Kabupaten / kota di Jawa Barat Menurut kriteria Tipologi Daerah

| PDRB Perkapita ( Y )<br>Laju Pertumbuhan (R) | > 6.506.200.000   | > 6.506.200.000  |
|--|---|--|
| > 5,72                                       | <i>Daerah Cepat Maju Dan Cepat Tumbuh :</i><br>Kab. Bekasi<br>Kota Bandung  | <i>Daerah Berkembang Cepat :</i><br>Kab. Bogor<br>Kota. Sukabumi<br>Kota. Bogor<br>Kota. Depok   |
| < 5,72                                       | <i>Daerah Maju Tapi Tertekan :</i><br>Kab. Indramayu<br>Kota. Cimahi<br>Kab. Purwakarta<br>Kab. Karawang<br>Kota. Cirebon | <i>Daerah Relatif Tertinggal :</i><br>Kab. Sukabumi<br>Kab. Cianjur<br>Kab. Bandung<br>Kab. Garut<br>Kab. Tasikmalaya<br>Kab. Ciamis<br>Kab. Kuningan<br>Kab. Cirebon<br>Kab. Majalengka<br>Kab. Sumedang<br>Kab. Subang<br>Kota Tasikmalaya<br>Kota. Banjar<br>Kota. Bekasi |

Lampiran A

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat bahwa pada priode 2004 hingga 2008, terdapat dua Kabupaten/Kota termasuk dalam kriteria daerah cepat maju dan cepat tumbuh, empat Kabupaten/Kota tergolong dalam kriteria daerah berkembang cepat. Sisanya lima kabupaten/kota tergolong dalam kriteria daerah maju dan tertekan dan 14 Kabupaten/Kota termasuk dalam kriteria daerah relatif tertinggal, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan wilayah.

Ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2004). Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Di mana ketika suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang tinggi maka wilayah tersebut dapat dikatakan wilayah yang makmur. Prof. Simon Kuznets dalam Todaro (2004) mengemukakan empat karakter atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian

dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar daerah (Masli, 2008)

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang belakangan ini banyak diterapkan oleh berbagai wilayah di Indonesia termasuk Jawa Barat yaitu aglomerasi. Aglomerasi menurut Marshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut (Amini Hidayati dan Mudrajad Kuncoro, 2004).

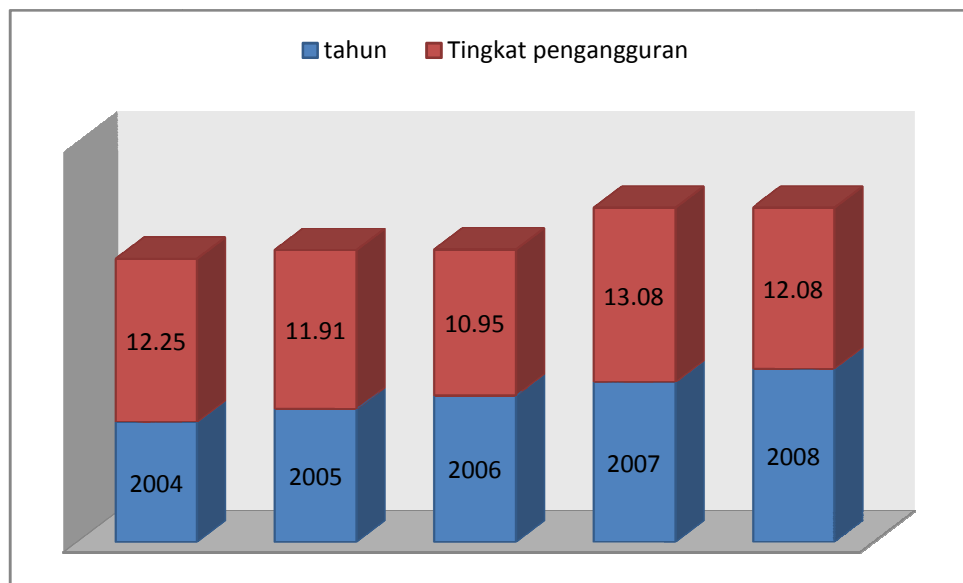
Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat (Syafrizal, 2008). Akan tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang.

Selain pertumbuhan ekonomi dan agromerasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah. (Akai dan sakata, 2005) serta (Lesman, 2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat ketimpangan wilayah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta panjang jalan raya.

Dalam penelitian (Akai dan sakata, 2005) dan (Lesman, 2006) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan ketimpangan wilayah, dengan semakin tinggi tingkat pengangguran yang ada itu akan menambah ketimpangan wilayah. Berikut adalah gambar mengenai perkembangan jumlah pengangguran di Jawa Barat tahun 2004-2008.

Gambar 1.1  
Perkembangan Jumlah Pengangguran Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2004-2008 (persen)

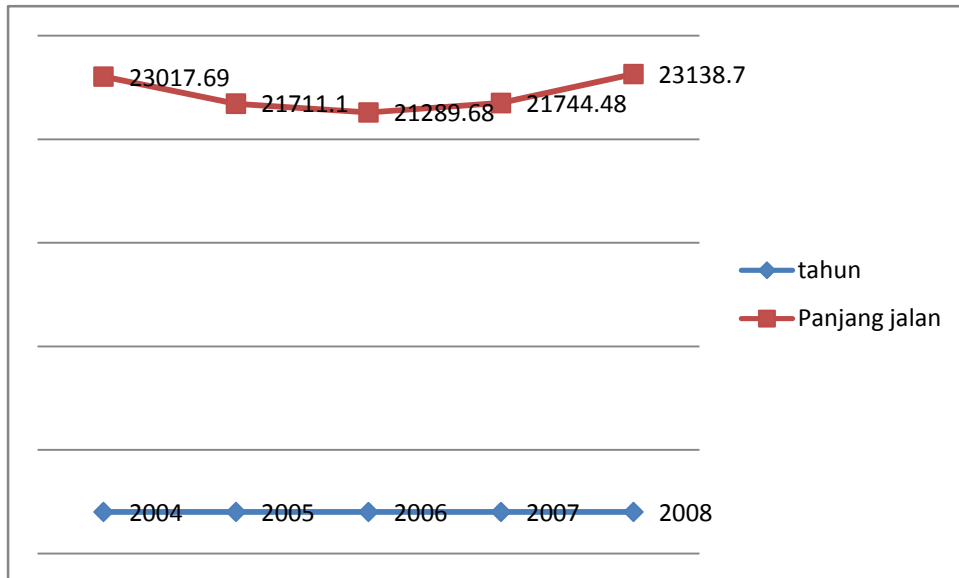


Sumber BPS Jawa Barat, Diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 ditunjukkan bahwa pada tahun 2004 sebesar 12,25%, dan menurun ditahun 2005 dan 2006 sebesar 11,91 dan 10,95, tetapi meningkat tajam pada tahun 2007 sebesar 13,08 dan menurun ditahun 2008 sebesar 12,08.

Panjang jalan juga mempengaruhi ketimpangan wilayah, dalam penelitian (Akai dan sakata, 2005) menemukan bahwa panjang jalan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wialayah. Tetapi menurut Sirojuzilam, (2009) menemukan bahwa panjang jalan yang tidak merata antara wilayah timur, wilayah barat, dan dataran tinggi di wilayah Provinsi Sumatra Utara. Sebagian besar dari panjang jalan yang ada di berbagai daerah baik di Wilayah Barat maupun di Wilayah Timur berada dalam kondisi buruk dan buruk sekali, sehingga menghambat kelancaran mobilitas baik barang maupun orang, dan kurangnya peranan jalan dalam menunjang ekonomi lokal adalah bahwa minimnya aktivitas ekonomi wilayah dan minimnya peran sektor industri. Dengan demikian sarana jalan yang ada belum banyak memberikan arti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, yang menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah. Berikut adalah gambar mengenai perkembangan panjang jalan di Jawa Barat Tahun 2004-2008.

Gambar 1.2  
Perkembangan Panjang Jalan Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008 (km)



Sumber BPS Jawa Barat, diolah.

Berdasarkan Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa pada tahun 2004 panjang jalan sebesar 23017.69 km, dan menurun di tahun 2005 dan 2006 sebesar 21711.1 km dan 21289.68 km, tetapi meningkat pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 21744.48 km dan 23138.7 km.

Pembangunan dalam lingkup spasial tidak selalu merata, ketimpangan wilayah menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Beberapa daerah yang ada mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama, ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya yang dimiliki. Di samping itu banyak para investor yang menanamkan modalnya pada suatu daerah yang sudah terpenuhi fasilitasnya, dengan berbagai pertimbangan yang ada untuk menunjang kemajuan dari

usahanya. Bagi daerah-daerah yang belum terjangkau akan mengakibatkan daerah-daerah tersebut akan tertinggal, karena minimnya fasilitas. Alhasil akan menyebabkan ketimpangan dan pendapatan di daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul “ **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran, Dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Pada 25 Kabupaten/Kota Menurut Tipologi Klassen di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perbedaan pertumbuhan di daerah dapat memicu ketimpangan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun dimana pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,77 persen (tahun 2004), hingga 6,48 persen (tahun 2007), dan menurun (tahun 2008) sebesar 5,84, diikuti dengan adanya ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan analisis tipologi daerah. Dari 25 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, ada 2 kabupaten yang masuk kriteria dari cepat maju dan cepat tumbuh atau (daerah dengan rata-rata PBRB perkapita serta rata-rata laju pertumbuhan ekonominya diatas rata-rata PDRB per kapita serta rata-rata laju pertumbuhan ekonominya diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat) dan 14 masuk kriteria daerah relatif tertinggal (daerah dengan rata-rata PDRB per kapita serta rata-rata laju pertumbuhan ekonominya dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat). Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan ketimpangan wilayah merupakan permasalahan dalam pembangunan, sehingga diperlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi ketimpangan wilayah, sehingga dapat dicari faktor-faktor yang dapat memicu pemerataan pembangunan wilayah. Berdasarkan gambaran diatas, maka masalah skripsi ini yang akan diteliti dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah?
2. Bagaimana pengaruh Aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan wilayah?
4. Bagaimana pengaruh panjang jalan terhadap ketimpangan wilayah?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah.
- b. Menganalisis pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah.
- c. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan wilayah.
- d. Menganalisis pengaruh panjang jalan terhadap ketimpangan wilayah.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah, sehingga dapat memahami lebih jauh

untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.

## 2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian ketimpangan wilayah dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

#### Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

#### Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

#### Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, panjang jalan serta aglomerasi dan dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan.

#### Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah**

Ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah di suatu daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Menurut (Syafirzal, 2008) ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*develop region*) dan wilayah terbelakang. (*underdeveloped region*).

Menurut Mudrajat Koncoro (2003), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (sukirno,2003).

Menurut Mydral (dalam Arsyad, 2004). Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan

kesenjangan antar daerah miskin di mana industri modern tidak pernah dapat berkembang dalam berbagai skala umumnya di tandai dengan daerah pertanian dengan usaha tani subsisten dan kecil, berpenduduk jarang dan tersebar dan tidak terdapat kota atau konsentrasi pemukiman yang relatif besar.

Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. (Syafrizal, 2008)

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

### **2.1.2 Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar wilayah**

Penetapan ukuran ketimpangan sangat penting, karena dalam melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah di suatu negara atau suatu daerah

bukanlah hal yang mudah karena dapat menimbulkan silang pendapat yang berkepanjangan, di mana satu pihak berpendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi dilihat dari banyaknya kelompok miskin di daerah yang bersangkutan, namun di pihak lain, ada pendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi dilihat dari segelintir kelompok kaya yang berada ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas masih miskin (Syafrizal, 2008)

Ada beberapa ukuran ketimpangan pembangunan, yakni :

**a. Indeks Williamson**

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 2008):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana :

- Y<sub>i</sub> = PDRB per kapita daerah i
- Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
- f<sub>i</sub> = Jumlah penduduk daerah i
- n = Jumlah penduduk seluruh daerah

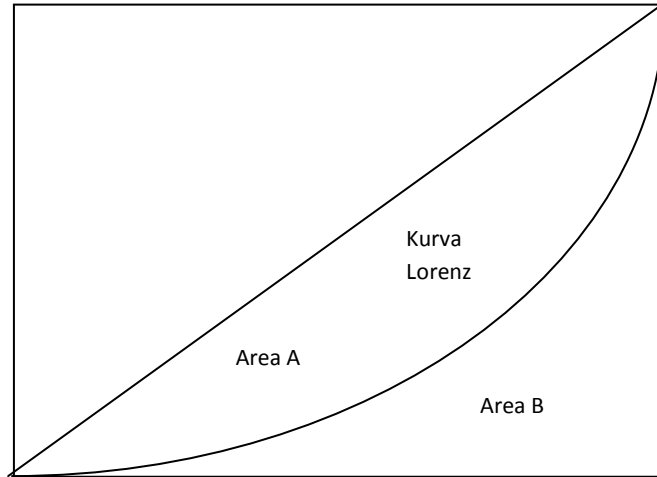
Indeks Williamson bernilai antara 0 - 1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah.

## **b. Koefisien Gini**

Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara Kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna dengan luas area di bawah Kurva Lorenz seperti yang nampak pada gambar 2.1. Semakin kecil nilai koefisien Gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin besar nilai koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis) dan Koefisien Gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (di mana satu orang memiliki/menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali (Hariadi,2008).

Gambar 2.1  
Kurva Lorenz

% Dari pendapatan



% Dari Jumlah Rumah Tangga

Sumber : Hariadi, 2008

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Jika kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang dikembangkan oleh Gini (1912). Kurva Lorenz diproksi atas setiap kelas interval dari pendapatan, sehingga luas area B pada kurva Lorenz dapat proksi dengan koefisien Gini: :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})(y_k - y_{k-1}) \dots \dots \dots (2.2)$$

$X_k$  adalah adalah proporsi kumulatif dari jumlah rumah tangga, untuk  $k = 0, \dots, n$ , dengan  $X_0 = 0$ ,  $X_n = 1$ .  $Y_k$  adalah proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke- $k$ , untuk  $k = 0, \dots, n$ , dengan  $Y_0 = 0$ ,  $Y_n = 1$

**c. Kesenjangan Berdasarkan Konsep PDRB Perkapita relatif**

Ketimpangan ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketimpangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif dengan rumus :

$$IQ_{i,t} = \left| \frac{PDRBPC_{it}}{PDRBPC_{JABAR,t}} - 1 \right| \dots\dots\dots(2.3)$$

dimana :

$IQ_{i,t}$  = Ketimpangan wilayah kabupaten/kota i, pada tahun t

$PDRBPC_{it}$  = PDRB perkapita Kabupaten/Kota i, pada tahun t

$PDRBPC_{Jabar,t}$  = PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat, pada tahun t

Rumus tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB perkapita wilayah sama dengan PDRB perkapita Jawa Barat. Oleh karena itu, ketimpangan wilayah diukur dari selisih antara PDRB per kapita relative (wilayah terhadap nasional) dan 1 (kondisi kesetaraan sempurna), yang diabsolutkan.

### **2.1.3. Faktor-faktor Penyebab ketimpangan Antar Wilayah**

Ketimpangan antar wilayah pada umumnya terjadi karena perbedaan *endowment faktor* yang dimiliki masing daerah, yakni faktor demografi dan faktor-faktor kekayaan yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah. Selain itu masih banyak faktor-faktor lain dari penyebab ketimpangan antar wilayah. Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi di mana pendapatan uang

bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Adapun penyebab-penyebab ketimpangan pembangunan ketimpangan antar wilayah menurut Syafrizal (2008), yakni :

a) Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang

tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah.

- b) Perbedaan kondisi demografis faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relative rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

c) Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kosentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi kosentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

d) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya di mana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi

dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

#### 2.1.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Boediono (1992) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, limapuluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian itu, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dipertimbangkan PDRB riil satu tahun (PDRB<sub>t</sub>) dengan PDRB riil tahun sebelumnya (PDRB<sub>t-1</sub>), atau dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \left| \frac{PDRB_{it} - PDRB_{t0}}{PDRB_{t0}} \times 100 \right| \dots\dots\dots(2.4)$$

Dimana:

Y<sub>it</sub> = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota i, tahun

PDRB<sub>ti</sub> = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t

PDRB<sub>t0</sub> = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t

PDRB = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t-1

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, betapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu ( Nur Pratama, 2010)

a. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domesrik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB maupun PDRB adalah ukuran yang global sifatnya, dan keduanya ini bukan merupakan alat ukur yang sesuai, karena belum dapat mensejahterakan penduduk yang sesungguhnya, padahal kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap negara maupun daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Perkapita / Pendapatan perkapita

Produk Domestik Bruto Perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada skala yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah yang lebih baik karena dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara maupun daerah yang bersangkutan dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk Domestik Bruto Perkapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

## **2.1.5. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan wilayah**

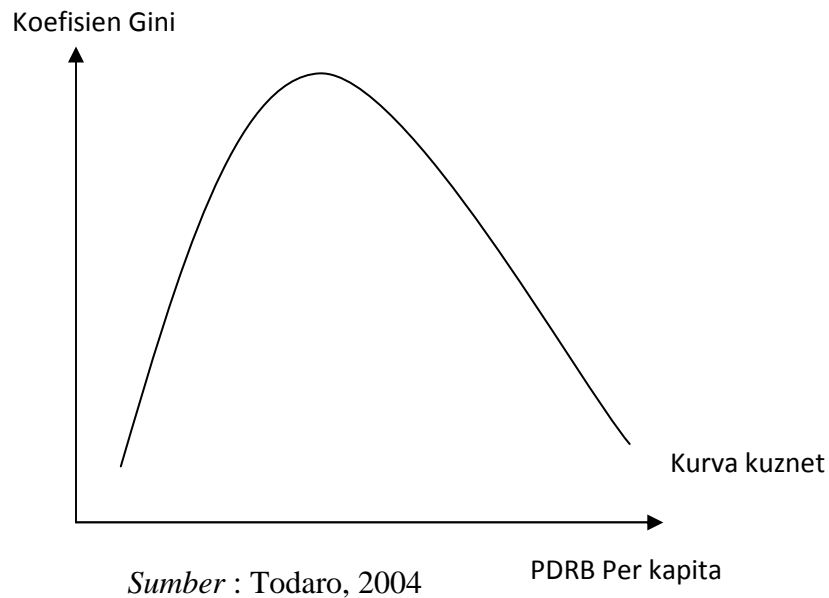
### **2.1.5.1 Hipotesis Kuznets**

Simon Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan

dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2004).

Simon Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets gambar 1.1, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

Gambar 2.2  
Kurva Kuznet



Profesor Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural yang ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal, 2008). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata di seluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang.

#### **2.1.6. Aglomerasi**

Mudrajad Kuncoro (2002) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.

Menurut Robinson Tarigan (2007), keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan *economic of agglomeration*. *Economic of scale* adalah keuntungan karena dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. Sedangkan *economic of*

*agglomeration* ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya tidak akan sama. Terdapat daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi disisi lain ada pula daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah. Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada munculnya aglomerasi, yaitu terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi persebaran yang merata (Angelia, 2010).

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses pembangunan akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

### **2.1.7 Hubungan antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan wilayah**

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cendeung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya,

bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Aglomerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi ekonomi. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik. (Syafrizal, 2008)

#### **2.1.8 Tipologi daerah**

Pendekatan tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Dengan menggunakan alat tipologi klassen adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang digunakan dalam penelitian Syafrizal untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Seperti pada pendekatan pertama, pendekatan wilayah juga menghasilkan empat klasifikasi kabupaten yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu :

1. Daerah bertumbuh maju dan cepat (*rapid growth region*)

Daerah maju dan cepat tumbuh (*rapid growth region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah maju tapi tertekan (*retarded region*).

Daerah maju tapi tertekan (*retarded region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah berkembang cepat (*growing region*).

Daerah berkembang cepat (*growing region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih

relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

4. Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*).

Kemudian daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya Syafrizal, 1997 ( dalam kuncoro, 2002)

### **2.1.9 Tingkat Pengangguran**

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Menurut definisi BPS, (2011) pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usah, mereka yang tidak mencari

pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran menurut BPS dihitung dengan Cara:

$$\text{Tingkat pengangguran } th_i = \sum \frac{\text{Orang yang mencari pekerjaan}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.5)$$

Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

#### **2.1.10 Hubungan antara Tingkat Pengangguran dengan Ketimpangan wilayah.**

Ketimpangan wilayah disebabkan juga karena adanya perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar wilayah. Menurut Syafrizal (2008), kondisi demografis dalam suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung meningkatkan produktivitas kerja,

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat produktivitas suatu wilayah, akan menyebabkan produktivitas suatu wilayah tidak optimal sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal dengan wilayah yang lain. Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran di suatu daerah, menurut Lesman (2006), tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi pula.

### **2.1.11 Hubungan Panjang Jalan**

Jalan merupakan salah satu prasarana publik yang berperan penting terhadap pelaksanaan dari kegiatan ekonomi. Jalan merupakan sarana transportasi yang mendukung dari mobilitas barang maupun orang antar daerah. Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan rel. Jalan merupakan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional

untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

*Peran Jalan (UU 38/2004, Pasal 5) :*

- 1) *Sebagai bagian prasarana transportasi : mempunyai peran penting dalam bidang. Ekonomi, sosial, budaya, LH., politik, hankam, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- 2) *Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa : merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.*
- 3) *Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan : menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia*

Jalan yang ada di suatu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.

#### **2.1.12 Hubungan antara Panjang Jalan dengan ketimpangan wilayah.**

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Bila mobilitas barang dan jasa tidak lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak akan dapat didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan. Kelancaran mobilitas dapat dilihat dari sarana transportasi dan komunikasi suatu wilayah, menurut Mirnasari (dalam Nur Pratama, 2010) salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah adalah ketidaklancaran sarana transportasi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pertumbuhan ekonomi maupun ketimpangan antar wilayah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Beberapa diantaranya terdapat pada tabel penelitian sebagai berikut:

| No | Peneliti                     | Variabel Penelitian                      | Model   | Hasil  |
|----|------------------------------|--|---|--|
| 1  | Sutarno dan Mudrajad Kuncoro | PDRB perkapita, dan pertumbuhan Ekonomi. | <p>1. Indeks Williamson</p> $IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 fi/n}}{Y}$ <p>Dimana :</p> <p><math>Y_i</math> = PDRB per kapita daerah i<br/> <math>Y</math> = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah<br/> <math>f_i</math> = Jumlah penduduk daerah i<br/> <math>n</math> = Jumlah penduduk seluruh daerah.</p> <p>2. Indeks Entrophy Theil</p> $I(y) = \sum \left( \frac{y_j}{Y} \right) \times \log \left[ \frac{y_j}{Y} / \left( \frac{x_j}{\#} \right) \right]$ <p>Di mana :</p> <p><math>I(y)</math> : Indeks Entrophy Theil<br/> <math>y_j</math> : PDRB per kapita kota/kabupaten j<br/> <math>Y</math> : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu daerah/kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/district yang berkembang cepat dan kecamatan/district tertinggal.</li> <li>Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial.</li> <li>Hipotesis Kuznets mengenai</li> </ol> |

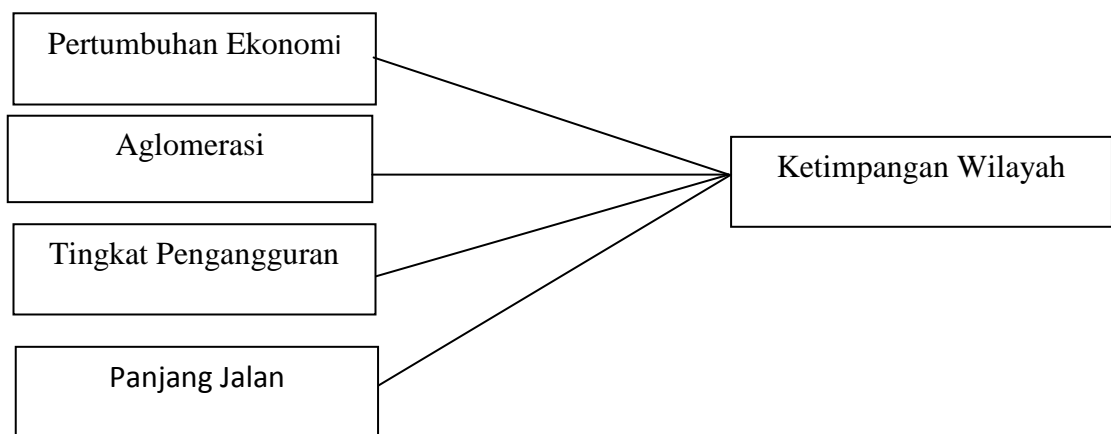
|    |                 |   |   |   |
|----|-----------------|---|---|---|
|    |                 |   | <p><math>x_j</math> :Jumlah penduduk kota/kabupaten <math>j</math><br/> <math>X</math> : Jumlah penduduk Provinsi</p> <p>3. Tipologi Klassen.<br/> Alat analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah.</p>  | <p>ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993–2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.</p> |
| 2  | Cristian Lesman | <p>Tingkat Disparitas, koefisien gini dari distribusi populasi regional, bagian dari orang-orang yang hidup dikota, besarnya populasi, GDP perkapita, populasi pekerja sektor pertanian, rasio pengangguran, perdagangan global, pengeluaran sosial, bantuan pemerintah desentralisasi.</p> | <p>Model untuk Cross-section :<br/> <math>Disparity_i = \alpha + \beta Control_i + Y Decentralization_i + \epsilon_i</math><br/> Dimana :<br/> <math>Disparity_i</math> : rata-rata dari ukuran yang berbeda untuk ketimpangan regional dari tahun 1980-2000 pada negara <math>i</math>. <math>Control_i</math> : sebuah pengukapan garis vektor dari beberapa variabel control yang telah dijelaskan. <math>Decentralization_i</math> : mewakili rata-rata</p> | <p>Terdapat beberapa variabel yang signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan. Variabel popgini, gdpc, dan unempl berhubungan positif dengan variabel pop dan decentr berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.</p>  |
| 3. | Nubou akai      | <p>Desentralisasi, gdp perkapita, panjang jalan,</p>  | <p>Regresi Data Panel</p>   | <p>Variabel desentralisasi, gdp perkapita, tingkat pengangguran signifikan dengan berhubungan</p>   |

|    |                          |  |  |   |
|----|--------------------------|--|--|---|
|    | sakata dan Masayo sakata | tingkat metropololitas, tingkat pendidikan, manufaktur, efek politik, investasi, tingkat pengangguran, populasi. |  | positip dengan ketimpangan, sedangkan variabel panjang jalan, tingkat metropolitan, pendidikan, manufaktur, dan investasi signifikan dan berhubungan negatif terhadap ketimpangan.  |
| 4. | Jaime Bonet              | Desentralisasi fiskal, investasi, aglomerasi.  | $1_{it} = \beta_1 + \beta_2 FD_{i,t} + \beta_3 CV_{i,t} + \mu_{i,t}$ $1_{i,t} = \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{Na,t}} - 1$ <p>PCGDP<sub>i,t</sub> adalah pendapatan provinsi per kapita, dan PCGDP<sub>NAL,t</sub> adalah pendapatan nasional per kapita.</p> | <p>Dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional selama masa analisis. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yaitu alokasi dari porsi utama atas sumber daya lokal baru untuk pengeluaran sekarang (gaji dan upah), investasi infrastruktur dan modal, kurangnya komponen redistribusi dalam transfer nasional, serta kurangnya kapasitas institusional pada pemerintah daerah. Selain itu dua variabel kontrol yaitu keterbukaan perdagangan dan aglomerasi produksi juga berhubungan positif dan signifikan terhadap</p> <p>ketimpangan pendapatan regional.</p> |
| 5. | Sri Aditya Nur Pratama   | Pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, panjang jalan.   | Regresi Data Panel   | Dari pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, berpengaruh positif terhadap ketimpangan. sedangkan panjang jalan tidak signifikan sehingga berhubungan positif.   |

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.

Masalah ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan wilayah juga merupakan masalah yang belum dapat dihapuskan pada di Indonesia. Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera dan mengurangi ketimpangan. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pendapatan per kapita pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2.3  
Kerangka Pemikiran Teoritis



## **2.4 Hipotesis.**

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Diduga Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah Kabupaten/Kota Jawa Barat.
- b) Diduga aglomerasi berpengaruh positif terhadap terhadap ketimpangan wilayah Kabupaten/Kota Jawa Barat.
- c) Diduga tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan di wilayah Kabupaten/Kota Jawa Barat.
- d) Diduga panjang jalan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

##### 3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat), empat variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan wilayah di kabupaten/ kota Jawa Barat pada tahun 2004-2008. Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, aglomerasi, pengangguran, dan Panjang Jalan. Dan dalam penelitian ini ditambahkan variabel dummy cross section dalam hal ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

##### 3.1.2 Definisi Operasional Variabel

###### *a. Ketimpangan Pembangunan Wilayah (RD)*

Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah dihitung dengan menggunakan Pendekatan PDRB Per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Bonet (2006) dan Atur. J Sigalingging (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. Adapun rumus dari pendekatan PDRB per kapita relatif sebagai berikut:

$$IQ_{i,t} = \left| \frac{PDRBPC_{it}}{PDRBPC_{JABAR,t}} - 1 \right| \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana :

$IQ_{i,t}$  = Ketimpangan wilayah kabupaten/kota i, pada tahun t

$PDRBPC_{it}$  = PDRB perkapita Kabupaten/Kota i, pada tahun t

$PDRBPC_{Jabar,t}$  = PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat, pada tahun t

*b. Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan Ekonomi (PE), berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi wilayah diukur melalui logaritma natural Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk menangkap perubahan relatif (dibandingkan tahun sebelumnya) dari PDRB per kapita. Yaitu dihitung dengan menggunakan Rumus :

$$Y_{it} = \left| \frac{PDRB_{it} - PDRB_{t0}}{PDRB_{t0}} \times 100 \right| \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

$Y_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota i, tahun

$PDRB_{ti}$  = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t

$PDRB_{t0}$  = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t

$PDRB$  = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t-1

*c. Aglomerasi (Ag)*

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada

aglomerasi produksi yang dihitung dari *Share* PDRB wilayah terhadap total PDRB. Bila ditulis secara matematis sebagai berikut :

$$Ag = \frac{PDRB_{kab/kota}}{PDRB_{Jabar}} \dots\dots\dots (3.3)$$

*d. Tingkat Pengangguran*

Pengangguran adalah seseorang yang diartikan yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang yang diinginkannya. Nilai tingkat pengangguran merupakan presentase dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam prode waktu tertentu, sehingga dapat dirumuskan ( BPS ) :

$$\text{Tingkat pengangguran } th_i = \sum \frac{\text{Orang yang mencari pekerjaan}}{\Sigma \text{Angkatan Kerja}} \times 100\% \dots (3.4)$$

Pengertian dari orang yang sedang mencari pekerjaan tertentu atau dengan kata lain menganggur adalah seseorang yang tidak bekerja dan sekarang ini mencari sebuah pekerjaan menurut refrensi waktu tertentu, sedangkan pengertian angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Parameter variabel ini adalah persentase.

*e. Panjang Jalan*

Dalam penelitian ini data jalan yang digunakan adalah total panjang jalan Nasional, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten dan dinyatakan dalam satuan kilometer dimasing-masing kabupaten/kota.

### **3.2 Jenis dan sumber data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Anto Dajan (1991) yang dimaksud data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Definisi lain dari data sekunder menurut Kuncoro (2004) adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain:

- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat dalam beberapa terbitan.
- Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat serta data jumlah PDRB per kapita atas dasar harga konstan Jawa Barat Tahun 2004-2008
- b. Data jumlah penduduk untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta data jumlah penduduk di Jawa Barat tahun 2004-2008
- c. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2004-2008

- d. Data jumlah pengangguran dan angkatan kerja untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2004-2008
- e. Data panjang jalan yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2004-2008

### 3.3 Metode Analisis

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan Eviews 6. Analisis panel data adalah suatu metode yang menjelaskan mengenai gabungan dari data antar waktu (*time-series*) dengan data antar individu (*cross-section*) untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari suatu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu-waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati,2003). Menurut (Gujatrati, 2003)Adapun keuntungan dari perhitungan menggunakan regresi data panel dibanding dengan pendekatan cross section maupun time series, diantaranya :

1. Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), data memiliki variabilitas yang besar dan megurangi kolinelitas antara variabel penjelas dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
2. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat dibrikan hanya oleh data *cross-section* atau *time-series* saja.
3. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross-section*.

### 3.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (GR), variabel tingkat pengangguran (UNEMPL), variabel panjang jalan (ROAD), dan variabel Aglomerasi (AG) terhadap ketimpangan antar wilayah (INEQ) di Jawa Barat. Model data panel yaitu :

$$Y_{it} = \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + \beta_4 x_{it} + U_{it} \dots \dots \dots (3.5)$$

Model fungsi yang akan di gunakan untuk mengetahui ketimpangan antara wilayah di Jawa Barat yaitu :

$$INEQ = f(GR, UNEMPL, AG, ROAD) \dots \dots \dots (3.6)$$

Dimana :

INEQ = ketimpangan wilayah

GR = Pertumbuhan ekonomi

UNEMPL = Tingkat pengangguran

AG = Aglomerasi

ROAD = Panjang jalan.

i = Cross Section

t = Time series

$\beta$  = Koefisien

U = Error

### 3.4.1 Regresi Model Data Panel pendekatan *Fixed effect*

Estimasi model regresi dengan data panel dapat menggunakan pendekatan *fixed effect* model. Estimasi tergantung pada asumsi yang digunakan pada konstanta, koefisien kemiringan, dan variabel *error*. Ada beberapa kemungkinan :

1. Konstanta dan koefisien kemiringan konstan antar ruang dan waktu, dan variabel *error* menangkap perbedaan waktu dan individu. Estimasi menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) sehingga persamaan yang digunakan yaitu :

$$Y_{it} = \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + U_{it} \dots \dots \dots (3.7)$$

2. Koefisien kemiringan konstan tetapi konstanta bervariasi antara individu. Salah satu cara memasukan tiap unit *cross section* dalam perhitungan yaitu dengan membiarkan konstanta bervariasi antar unit cross section namun tetap mengasumsikan bahwa koefisien kemiringan adalah konstan antar unit cross section. Pendekatan tersebut dapat ditulis dengan persamaan berikut :

$$Y_{it} = \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + U_{it} \dots \dots \dots (3.8)$$

$i$  dalam konstanta pada persamaan tersebut menunjukkan perbedaan konstanta untuk tiap Kabupaten/Kota, model tersebut disebut *fixed effects model* ( FEM ). Dalam model FEM, konstanta untuk tiap Kabupaten/Kota berbeda tetapi koefisien kemiringan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sama untuk semua waktu. Untuk mengetahui perbedaan antara Kabupaten/Kota, digunakan variabel dummy, yakni :

$$Y_{it} = \alpha_1 D_{kab1i} + \alpha_2 D_{kab2i} + \dots + \alpha_{25} D_{kab25i} + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + \beta_4 x_{4it} + \beta_5 x_{5it} + U_{it} \dots \dots \dots (3.9)$$

$D_{kab}$  adalah dummy Kabupaten/Kota. Ketika menggunakan dummy untuk mengestimasi *fixed effects*, maka persamaan tersebut disebut *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*

3. Koefisien kemiringan konstanta tetapi konstanta bervariasi antara individu dan waktu.
4. Semua koefisien (konstanta dan koefisien kemiringan) bervariasi antara individu.
5. Konstanta dan koefisien kemiringan bervariasi antara individu dan waktu

Dalam penelitian ini pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi tingkat pengangguran, dan panjang jalan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008 digunakan asumsi FEM yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika variabel dummy digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*.

Penelitian ini menggunakan dummy wilayah, untuk melihat perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama 5 tahun periode penelitian (tahun 2004-2008) dimana Kabupaten Bogor sebagai wilayah

acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Kabupaten Bogor sebagai *benchmark* adalah Kabupaten Bogor memiliki rata-rata tingkat Ketimpangan wilayah kabupaten/kota terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Setelah memasukkan variabel dummy wilayah pada maka model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 INEQ_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 PE_{it} + \alpha_2 AG_{it} + \alpha_3 UNMPL_{it} + \alpha_4 ROAD_{it} + \gamma_1 D_1 + \gamma_2 D_2 + \\
 & \gamma_3 D_3 + \gamma_4 D_4 + \gamma_5 D_5 + \gamma_6 D_6 + \gamma_7 D_7 + \gamma_8 D_8 + \gamma_9 D_9 + \gamma_{10} D_{10} + \gamma_{11} D_{11} + \\
 & \gamma_{12} D_{12} + \gamma_{13} D_{13} + \gamma_{14} D_{14} + \gamma_{15} D_{15} + \gamma_{16} D_{16} + \gamma_{17} D_{17} + \gamma_{18} D_{18} + \gamma_{19} D_{19} \\
 & + \gamma_{20} D_{20} + \gamma_{21} D_{21} + \gamma_{22} D_{22} + \gamma_{23} D_{23} + \gamma_{24} D_{24} + \mu_{it} \dots \quad (3.10)
 \end{aligned}$$

dimana :

*INEQ* = tingkat ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat

*PE* = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat

*AG* = aglomerasi kabupaten/kota di Jawa Barat

*UNMPL* = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Barat

*P* = panjang jalan kabupaten/kota di Jawa Barat

D1 = dummy Kabupaten Sukabumi

D2 = dummy Kabupaten Cianjur

D3 = dummy Kabupaten Bandung

D4 = dummy Kabupaten Garut

D5 = dummy Kabupaten Tasikmalaya

D6 = dummy Kabupaten Ciamis

D7 = dummy Kabupaten Kuningan

D8 = dummy Kabupaten Cirebon

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| D9                             | = dummy Kabupaten Majalengka  |
| D10                            | = dummy Kabupaten Sumedang  |
| D11                            | = dummy Kabupaten Indramayu   |
| D12                            | = dummy Kabupaten Subang  |
| D13                            | = dummy Kabupaten Purwakarta  |
| D14                            | = dummy Kabupaten Karawang  |
| D15                            | = dummy Kabupaten Bogor   |
| D16                            | = dummy Kabupaten Sukabumi  |
| D17                            | = dummy Kabupaten Bandung   |
| D18                            | = dummy Kabupaten Cirebon   |
| D19                            | = dummy Kabupaten Bekasi  |
| D20                            | = dummy Kabupaten Depok   |
| D21                            | = dummy Kota Bekasi   |
| D22                            | = dummy Kabupaten Cimahi  |
| D23                            | = dummy Kabupaten tasikmalaya   |
| D24                            | = dummy Kabupaten Banjar  |
| $\alpha_0$                     | = intersep  |
| $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ | = koefisien regresi variabel bebas  |
| $\gamma_1 - \gamma_{24}$       | = koefisien dummy wilayah   |
| $\mu_{it}$                     | = komponen error di waktu t untuk unit <i>cross-section</i> i               |
| i                              | = 1, 2, 3, ..., 25 (data <i>cross-section</i> kabupaten/kota di Jawa Barat) |
| t                              | = 1, 2, 3, 4 (data <i>time-series</i> , tahun 2004-2008)                    |

Model persamaan tersebut akan diregres masing-masing dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

### **3.4.2 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik.**

#### **3.4.2.1 Uji Heteroskedastisitas**

Salah satu asumsi penting dari model regresi linier adalah bahwa nilai residual (*Disturbance Term*) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastis, atau dengan kata lain varians dari residual adalah sama. Jika varian dan residual tidak sama, maka akan muncul permasalahan yang disebut heterokedastisitas. Permasalahan heterokedastisitas menyebabkan model menjadi biasa, namun menyebabkan model menjadi biasa, namun menyebabkan model tidak lagi mempunyai varians yang efisien atau yang minimum. Hal ini menyebabkan asumsi best dalam BLUE tidak dapat tercapai.

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dalam sebuah model, dapat menggunakan uji White. Uji ini secara manual dapat dilakukan dengan melakukan regresi dengan menempatkan residual kuadrat sebagai variabel dependent terhadap variabel bebas. Dapatkan nilai R<sup>2</sup> untuk menghitung  $x^2$ , dimana  $x^2 = n * R^2$ . (Gujarati,2004)

Pengujiannya adalah jika  $x^2 < x^2$ , tabel maka hipotesis aternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

#### **3.4.2.2 Uji Autokorelasi**

Menurut Imam Ghozali (2005), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji *Breusch-Godfrey* (BG Test). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu  $u_t$  dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde  $p$  sebagai berikut :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.11)$$

Dengan  $H_0$  adalah  $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$  dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual, apabila  $\chi^2$  tabel lebih kecil dibandingkan dengan  $Obs \cdot R\text{-squared}$ , maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model dapat ditolak.

### 3.4.2.3 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas mempunyai pengertian bahwa ada hubungan linier yang “sempurna” atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independent (variabel yang menjelaskan) dari model regresi. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Multikolinieritas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih besar dari  $R^2$  auxiliary regressions maka dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

#### **3.4.2.4 Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Imam Ghozali, 2005).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera (J-B) *Test* dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *Test*, apabila J-B hitung < nilai  $\chi^2$  (Chi Square) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.

#### **3.4.3 Pengujian Statistik**

##### **3.4.3.1 Pengujian $R^2$**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan antara variabel independent yang digunakan dengan variabel dependent.  $R^2$  adalah angka yang menunjukkan besarnya proporsi atau persentase variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama. Besarnya  $R^2$  berada diantara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 nilai  $R^2$  berarti dapat dikatakan bahwa model variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen mendekati

100%. Ukuran  $R^2$  akan semakin mengecil jika semakin banyak variabel independent yang digunakan.

#### **3.4.3.2 Uji Keseluruhan ( f-stat)**

Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \gamma_1 = 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi (PDRBPK), tingkat pengangguran (UNEMPL), Aglomerasi (AG), panjang jalan (ROAD), dan dummy wilayah.

$H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq \alpha_5 \neq \gamma_1 \neq \gamma_2 \neq 0$ , yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi ( PDRBPK), tingkat pengangguran ( UNEMPL), Aglomerasi (AG), panjang jalan (ROAD), dan dummy wilayah.

Pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut.

- a. Jika  $F\text{-dihitung} > F\text{-tabel}$ , atau jika probabilitas  $F\text{-hitung} < \text{tingkat } 0,5$  maka  $H_0$  di tolak, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. Jika  $F\text{-dihitung} < F\text{-tabel}$ , atau jika probabilitas  $F\text{-hitung} > \text{tingkat } 0,5$  maka  $H_0$  di tolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.4.3.3 Uji Parsial ( t-stat)

(Imam Ghozali, 2005) Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, untuk menguji pengaruh variabel independen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1)  $H_0 : \alpha_1 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

$H_1 : \alpha_1 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

2)  $H_0 : \alpha_2 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel tingkat pengangguran secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

$H_1 : \alpha_2 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel tingkat pengangguran secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

3)  $H_0 : \alpha_3 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel aglomerasi secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

$H_1 : \alpha_3 > 0$  yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel Aglomerasi secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

4)  $H_1 : \alpha_4 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel panjang jalan secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

$H_1 : \alpha_4 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel panjang jalan secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

5)  $H_0 : \gamma_1 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel dummy wilayah secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

$H_0 : \gamma_1 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel dummy secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.